

Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota, Bhisma Murti dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Murti, Bhisma. 2006. Menghitung Biaya Intervensi Kesehatan dalam *Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Probandari, Ari dan Bhisma Murti. 2006. Perencanaan dan Penentuan Prioritas Kesehatan dalam *Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*, Bhisma Murti dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachmat, Hapsara Habib. 2004. *Pembangunan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rondinelli, D.A. 1981. *Government Decentralization in Comparative Theory and Practice in Developing Countries*. International review of administrative sciences 47(2): 133-145.

Saefullah, Avip. 2005. *Relevansi Pembangunan Kesehatan Daerah Terhadap Kebijakan Nasional di Era Otonomi Daerah*. Padjajaran: Universitas Padjajaran.

Siagian, Albiner. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Kesehatan (Suatu Kajian Kesiapan Daerah Menghadapi Desentralisasi Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sukarna, Laode A dkk, 2006. *Analisis Kesiapan Dinas Kesehatan Dalam Mengalokasikan Anggaran Kesehatan Pada Era Desentralisasi*. Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.

Sumarto, Mulyadi. 2007. Aspek Pemerataan dan Keamanan dalam *Sumberdaya manusia Tantangan Masa Depan*, Tukiran dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Alokasi anggaran pembangunan sektor kesehatan antar kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah
Cicik Oktasari Handayani, Dr. Rijanta, M.Sc.
Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Trisnantoro, Laksono dan Deni Harbianto. 2005. *Desentralisasi Pembiayaan Kesehatan dan Teknik Alokasi Anggaran dalam Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001-2003*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata-cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.